

Katalog : 4103005.3308

PROFIL ANAK KABUPATEN MAGELANG

2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAGELANG**

PROFIL ANAK KABUPATEN MAGELANG

2017



PROFIL ANAK KABUPATEN MAGELANG

2017

ISBN : 978-602-532-420-8
No. Publikasi : 33080.1834
Katalog : 4103005.3308

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : viii + 41 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Gambar Kover oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Ilustrasi Kover :

Aktivitas Anak Kabupaten Magelang

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Dicetak oleh :

TM Percetakan

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

Anak merupakan aset penting bagi sebuah keluarga. Dalam lingkup yang lebih luas yaitu bangsa, anak diharapkan mempunyai andil besar demi kemajuan dan kemakmuran bangsa pada masa yang akan datang. Untuk itu baik keluarga maupun negara diharapkan menjadi pendukung utama bagi terwujudnya anak Indonesia yang sehat dan berkualitas agar kemajuan dan kemakmuran bangsa di masa mendatang dapat tercapai.

Tahun 2017 mencatat, jumlah anak berumur 0-18 tahun di Kabupaten Magelang mencapai sepertiga jumlah penduduk Kabupaten Magelang (30,22 persen) atau sekitar 383 ribu jiwa lebih di mana merupakan suatu pekerjaan besar bagi pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat mewujudkan kehidupan anak yang sejahtera, maju dan dapat bersaing secara global.

Dengan terbitnya publikasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang kondisi anak Indonesia khususnya di Kabupaten Magelang dilihat dari berbagai sudut pandang seperti pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial, pekerjaan, dan perlindungan hukum.

Kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian publikasi Profil Anak Kabupaten Magelang Tahun 2017 ini, disampaikan terima kasih. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang.

Kota Mungkid, November 2018

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Magelang



Ir. Sri Wiyadi, M.M.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
Infografis.....	1
Bab I Pendahuluan.....	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Tujuan	3
1.3. Sumber Data	3
1.4. Sistematika Penyajian	3
Bab II Hak Sipil dan Kebebasan	4
2.1. Jumlah dan Komposisi Anak	4
2.2. Rasio Jenis Kelamin.....	6
2.3. Kepemilikan Akte Kelahiran	7
2.4. Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	9
Bab III Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	11
3.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11
3.2. Anak dan Keluarga yang Tinggal Bersama.....	13
3.3. Perkawinan Usia Dini	14
Bab IV Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	17
4.1. Penolong Kelahiran	17
4.2. Air Susu Ibu (ASI)	18
4.3. Imunisasi	20
4.4. Keluhan Kesehatan	21
4.5. Kebiasaan Merokok pada Anak	23

	Halaman
4.6. Akses ke Pelayanan Kesehatan	24
4.7. Jaminan Kesehatan	25
Bab V Pendidikan	26
5.1. Partisipasi Sekolah	26
5.2. APS, APM dan APK	28
5.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	29
5.2.2. Angka Partisipasi Murni (APM).....	30
5.2.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)	31
5.3. Alasan Tidak Sekolah.....	32
Bab VI Perlindungan Khusus.....	35
6.1. Perkembangan Perlindungan Anak	35
6.2. Anak 10-18 Tahun yang Bekerja	36
6.2.1. Umur Anak yang Bekerja	36
6.2.2. Anak 10-18 Tahun Bekerja Menurut Pendidikan.....	37
6.2.3. Anak 10-18 Tahun Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan	38
6.2.4. Anak 10-18 Tahun Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	39
6.2.5. Anak 10-18 Tahun Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Pekerjaan Utama	40

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin (RJK), 2017	5
Tabel 2.2 Persentase Anak 0-18 Tahun Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin, 2017	6
Tabel 2.3 Persentase Anak 5-18 Tahun Menurut Akses Terhadap Teknologi Informasi, 2017	9
Tabel 3.1 Persentase Anak 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah, 2017.....	12
Tabel 3.2 Persentase Anak 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah, 2016-2017.....	12
Tabel 4.1 Persentase Balita (0-59) Bulan yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi dan Jenis Kelamin, 2017	21
Tabel 4.2 Persentase Anak yang Berobat Jalan Menurut Jenis Fasilitas Kesehatan dan Jenis Kelamin, 2017	24
Tabel 4.3 Persentase Anak yang Berobat Jalan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan dan Jenis Kelamin, 2017	25
Tabel 5.1 Persentase Anak 5-18 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2017.....	27
Tabel 5.2 Persentase Anak 5-18 Tahun menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2017.....	27
Tabel 5.3 APS Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2017	30
Tabel 5.4 Persentase Anak 7-18 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah/ Tidak Bersekolah Lagi Menurut dan Jenis Kelamin, 2017	33
Tabel 6.1 Persentase Anak 10-18 Tahun Yang Bekerja Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi yang pernah/sedang Diduduki dan Jenis Kelamin, 2017.....	38
Tabel 6.2 Persentase Anak 10-18 Tahun Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2017	38

Tabel 6.3 Persentase Anak 10-18 Tahun Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2017	40
---	----

Tabel 6.4 Persentase Anak 10-18 Tahun Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2017	41
--	----

<https://magelangkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Persentase Anak 0-18 Tahun Menurut Kepemilikan Akte Kelahiran, 2018.....	8
Gambar 3.1 Persentase Anak yang Tinggal Serumah dengan Ibu Kandung, 2017.....	14
Gambar 3.2 Persentase Anak Perempuan 10-18 Tahun Menurut Status Perkawinan, 2017.....	16
Gambar 4.1 Persentase Penolong Pertama Proses Kelahiran, 2017	18
Gambar 4.2 Persentase Balita (0-23 bulan) yang Diberi ASI Menurut Lama Pemberian ASI, 2017.....	19
Gambar 4.3 Persentase Alasan Anak 0-18 Tahun Tidak Berobat Jalan, 2017	22
Gambar 4.4 Persentase Anak 5-18 Tahun yang Merokok Tembakau, 2017	23
Gambar 5.1 Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Menurut Jenjang Pendidikan, 2017	31
Gambar 5.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Menurut Jenjang Pendidikan, 2017.....	32
Gambar 6.1 Persentase Anak Menurut Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin, 2017	36

PROFIL ANAK KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017



4,9% ANAK USIA - 18 TAHUN
BELUM MEMILIKI AKTE KELAHIRAN



95,90% ANAK USIA 0 - 18 TAHUN
TINGGAL SERUMAH DENGAN IBU KANDUNG

30,22%
PENDUDUK KAB. MAGELANG
ADALAH ANAK-ANAK
(0-18 TAHUN)



81,39% ANAK USIA 5 - 18 TAHUN
DUDUK DI BANGKU SEKOLAH



35% ANAK USIA 5 - 12 TAHUN
MENGUNAKAN TELEPON SELULAR/HP

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia merupakan tujuan utama pembangunan nasional. Upaya peningkatan kesejahteraan ini meliputi seluruh golongan masyarakat termasuk kesejahteraan anak. Dalam pembangunan nasional, anak-anak merupakan potensi yang harus dikembangkan karena anak-anak adalah penerus cita-cita bangsa. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Untuk itu anak-anak perlu mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial.

Namun dalam kenyataan, masih banyak anak-anak yang belum memperoleh kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, adanya kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak dan perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja anak merupakan bukti bahwa masih terdapat anak yang hidup dalam kesewenangan baik oleh orang tua sendiri maupun orang dewasa lainnya. Kepedulian pemerintah terhadap pembinaan anak dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas diantaranya dengan mengadakan program wajib belajar 9 tahun, meningkatkan kesadaran orang tua dalam mendidik dan membina anak dan remaja, menurunkan tingkat kenakalan remaja, serta meningkatkan kesejahteraan bagi anak-anak.

Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Mereka adalah kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.

Dalam Profil Anak Kabupaten Magelang Tahun 2017 ini akan dilihat sejauh mana keadaan anak di Kabupaten Magelang ditinjau dari segi status perkawinan, pendidikan, kesehatan dasar, serta ketenagakerjaan dalam masyarakat. Konsep anak yang digunakan dalam profil ini adalah penduduk yang berusia sampai dengan 18 tahun (0 – 18 tahun).

1.2 Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak di Kabupaten Magelang yang diamati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik terhadap masalah sosial, hukum, kekerasan, dan pekerja anak.

1.3 Sumber Data

Publikasi ini menggunakan Data Susenas 2017.

1.4 Sistematika Penyajian

Bab pertama menyajikan pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, sumber data serta sistematika publikasi. Bab kedua menyajikan tentang hak sipil dan kebebasan. Bab ketiga tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, bab keempat kesehatan dasar dan kesejahteraan, bab kelima pendidikan, sedangkan bab ke enam perlindungan khusus.

2. HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

2.1 Jumlah dan Komposisi Anak

Karakteristik usia secara jelas mendefinisikan perbedaan yang memisahkan antara anak dari orang dewasa. Anak yang dimaksud di sini adalah seorang yang berusia 0-18 tahun. Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Dari sudut pandang anak sebagai aset, anak merupakan salah satu modal sumber daya manusia, jika dipenuhi semua kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini akan membentuk anak tumbuh menjadi manusia berkualitas. Sebaliknya jika kebutuhan anak tidak terpenuhi, dikhawatirkan akan menurunkan kualitas hidup anak atau sebagian dari mereka akan menimbulkan masalah bagi keluarga, masyarakat maupun negara.

Dari tabel 2.1 dibawah diketahui penduduk Kabupaten Magelang berjumlah 1 268 396 jiwa, penduduk yang berumur 19 Tahun keatas 885 044 jiwa atau sebesar 71,38 persen, dengan rasio jenis kelamin 98,38 persen yang artinya setiap 10 000 penduduk perempuan ada sejumlah 9 838 penduduk laki-laki. Dan penduduk berumur 0-18 tahun mencapai 383 352 jiwa atau sebesar 30,22 persen. Apabila dilihat dari sudut pandang ketergantungan maka sepertiga dari penduduk Kabupaten Magelang masih membutuhkan perlindungan baik oleh keluarga, masyarakat ataupun negara.

Dari penduduk umur 0-18 ini jika dibedakan menurut jenis kelamin, jumlah penduduk anak laki-laki lebih besar daripada penduduk anak perempuan, namun perbedaan tersebut relatif kecil. Di mana 197 478 jiwa (51,51 persen) berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 185 873 jiwa (48,49 persen) adalah perempuan,

dengan rasio jenis kelamin 106,24 persen yang berarti bahwa setiap 10 000 penduduk perempuan ada 10 624 penduduk laki-laki.

Tabel 2.1 Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin (RJK), 2017

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	%	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0-18	197 478	185 873	383 352	30,22	106,24
19+	438 906	446 139	885 044	71,38	98,38
Jumlah	636 384	632 012	1 268 396	100,00	100,69

Sumber: Susenas 2017

Kebutuhan dasar yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk anak terlihat masih cukup besar misalnya bidang kesehatan dan pendidikan. Masih sangat dibutuhkan peran serta orang tua untuk akses kepada pelayanan kesehatan agar mengurangi angka kesakitan dan angka kematian bayi, balita, dan anak. Anak bayi maupun balita membutuhkan layanan kesehatan yang baik, sehingga mereka bisa melewati tahun kritis di awal kehidupannya di mana kesehatannya sangat rentan terhadap berbagai jenis penyakit. Usaha pemerintah meningkatkan kesehatan anak melalui layanan imunisasi, pemberian vitamin, makanan tambahan berperan penting dalam menurunkan kematian bayi dan meningkatkan kualitas kesehatannya.

Bidang pendidikan juga tidak kalah pentingnya di mana pendidikan merupakan sarana untuk membentuk generasi yang berkualitas. Penyediaan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah mutlak diperlukan disamping pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Persebaran penduduk menurut usia sekolah maupun pra sekolah sebagaimana terlihat pada tabel 2.2. Persentase penduduk pada kelompok usia pendidikan dasar yaitu 7-12 tahun tercatat sebesar 31,85 persen, kelompok usia pendidikan pra sekolah 0-6 tahun 35,92 persen, dan

kelompok pendidikan usia menengah 13-18 tahun sebesar 32,23 persen. Besarnya persentase penduduk muda yang memerlukan pendidikan ini menjadi kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk menyediakan akses pendidikan yang adil dan merata sehingga pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Magelang.

Tabel 2.2 Persentase anak 0-18 Tahun Menurut
Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin, 2017

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	12,95	12,42	25,37
5-6	5,40	5,15	10,55
7-12	16,25	15,60	31,85
13-15	8,33	7,74	16,07
16-18	8,58	7,58	16,16
Jumlah	51,51	48,49	100,00

Sumber : Susenas 2017

2.2 Rasio Jenis Kelamin (RJK)

Pada tabel 2.1 tampak bahwa rasio jenis kelamin kelompok umur 0-18 tahun sebesar 106,24. Secara umum dapat dikatakan bahwa pada tahun 2017 penduduk Kabupaten Magelang yang berumur 0-18 yang di sebut sebagai anak, lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Walaupun laki-laki tercatat lebih banyak daripada perempuan, dalam mendukung kesetaraan gender maka baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang setara untuk memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan yang baik. Sedangkan pada kelompok umur yang lebih tua (umur 19 tahun ke atas), rasio jenis kelamin sebesar 98,38 yang mengindikasikan proporsi penduduk laki-laki semakin berkurang. Secara alami ini

berkaitan dengan angka harapan hidup laki-laki yang memang lebih rendah daripada perempuan.

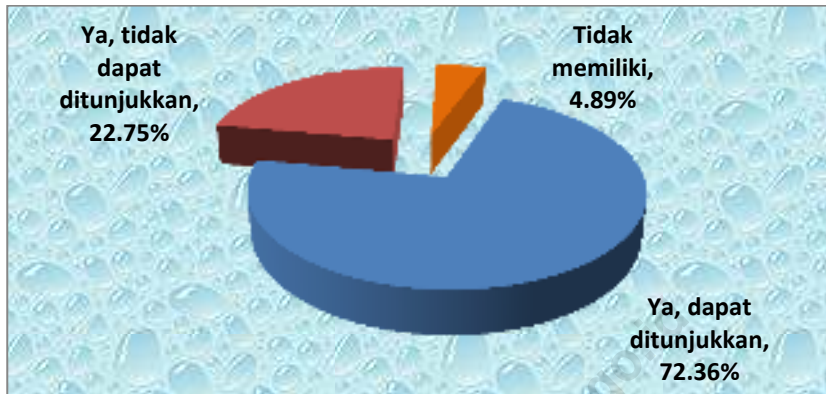
2.3 Kepemilikan Akte Kelahiran

Kepemilikan akte kelahiran merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Akta kelahiran merupakan hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang di wilayah suatu negara. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Ketika tidak ada bukti diri, dikemudian hari dapat disalahgunakan dengan membuat keterangan identitas yang dimanipulasi sehingga banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan.

Akta kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Indonesia termasuk salah satu negara yang cakupan pencatatan kelahirannya buruk. Banyak faktor yang memengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, biaya yang tinggi untuk pencatatan, prosedur yang sulit, serta kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota.

Gambar 2.1 menunjukkan kepemilikan akte kelahiran untuk anak 0-18 tahun. Susenas 2017 mencatat sebesar 95,11 persen penduduk 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran dan terdapat 4,89 persen yang tidak memiliki akte kelahiran.

Gambar 2.1 Persentase Anak 0-18 Tahun Menurut Kepemilikan Akte Kelahiran, 2017



Jika dilihat kepemilikan akte kelahiran pada gambar 2.1, terlihat bahwa sebanyak 72,36 persen anak yang sudah memiliki akte, 22,75 persen memiliki tapi pada saat pendataan, mereka tidak bisa menunjukkan wujud akte tersebut, bisa jadi karena sudah hilang, lupa tempat menyimpan ataupun disimpan oleh orang lain. Dan ada sebanyak 4,89 persen anak yang tidak memiliki akte. Alasan mereka tidak memiliki akte ini beragam antara lain orang tua sudah mendaftar dan mengurus akte kelahiran, hanya saja sampai dengan saat survei dilakukan akte kelahiran anak belum terbit. Yang perlu mendapat perhatian adalah orang tua beralasan tidak mempunyai biaya untuk mengurus, ada yang menyatakan tidak tahu cara mengurus akte kelahiran dan masih ada orang tua yang beranggapan masih merasa tidak perlu terhadap kepemilikan akte kelahiran.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah khususnya dinas terkait yang menangani permasalahan akte kelahiran. Sosialisasi perlu lebih ditingkatkan kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan akte kelahiran dan program pembuatan akte kelahiran gratis. Selain itu pemerintah perlu membuat program layanan jemput bola langsung ke masyarakat bekerjasama dengan rumah sakit, klinik bersalin bahkan para bidan praktek di setiap kelurahan.

2.4 Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penemuan terbesar yang merubah peradaban manusia di abad 21 adalah penemuan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi antara satu dengan lainnya. Interaksi antar manusia telah mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Dahulu, orang menggunakan sarana kertas untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi dari satu tempat ke tempat lain melalui surat menyurat. Karena semakin meningkatnya kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat, surat menyurat melalui media kertas mulai ditinggalkan. Meskipun demikian, kertas sampai sekarang masih banyak digunakan sebagai media penyampai informasi seperti majalah, koran dan sebagainya. Kemudian muncul media lain seperti telepon kabel, lalu telepon nirkabel dan terus berevolusi hingga ditemukannya internet. Dengan itu, cara manusia berinteraksi antar satu dengan yang lain telah berubah secara drastis menjadi lebih cepat dan mudah.

Tabel 2.3 Persentase Anak 5-18 Tahun Menurut Akses Terhadap Teknologi Informasi, 2017

Kelompok Umur	Menggunakan Telepon Seluler/HP	Menggunakan Komputer	Mengakses Internet
1	2	3	4
5 - 12	35,0	11,9	10,9
13 -15	68,2	51,4	54,6
16 - 18	88,8	72,1	81,8

Sumber : Susenas 2017

Pada tabel 2.1 diatas disajikan persentase anak 5 – 18 tahun bahwa akses terhadap teknologi Informasi seperti menggunakan telepon seluler, menggunakan

komputer dan mengakses internet, yang dikelompokkan berdasar usia sekolah SD, SMP dan SMA terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan anak-anak tersebut, akses terhadap teknologi informasi semakin besar. Karena memang saat ini sudah sangat dekat mereka dengan dunia informasi juga karena saat ini di sekolahpun setiap kegiatan pembelajaran bilamana ada tugas bisa dipastikan akan mengharuskan mencari sumber-sumber referensi dari internet baik menggunakan HP maupun komputer sebagai medianya.

<https://magelangkab.bps.go.id>

3. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

3.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini menitikberatkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No. 20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD penyelenggaraannya di beberapa Negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun (masa emas).

Dari tabel 3.1 dibawah terlihat bahwa pada kegiatan masih/sedang mengikuti pra sekolah tahun ajaran ini untuk usia anak 0 -2 tahun akan jauh lebih kecil dibanding anak usia 3-4 tahun bahkan terhadap anak usia 5-6 tahun. Besaran angka ini akan diimbangi pada kegiatan tidak/belum pernah mengikuti pra sekolah. Pada kegiatan ini anak usia 0-2 tahun akan jauh lebih besar dibanding anak usia 3-4 tahun bahkan terhadap anak usia 5-6 tahun.

Tabel 3.1 Persentase Anak 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah, 2017

Kelompok Umur	Umur 0 – 2 Tahun	Umur 3 – 4 Tahun	Umur 5 – 6 Tahun
1	2	3	4
Masih/pernah mengikuti pra sekolah tahun ajaran ini	0,4 %	22,5 %	69,5 %
Pernah mengikuti pra sekolah tahun ajaran sebelum tahun ajaran ini	0,0 %	2,6 %	21,0 %
Tidak/belum pernah mengikuti pra sekolah	99,6 %	75,0 %	9,5 %

Sumber : Susenas 2017

Tabel 3.2 Persentase Anak 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah, 2016-2017

Jenis Pendidikan Pra Sekolah	2016	2017
1	2	3
TK/RA/BA	64.05	82.00
Kelompok bermain	12.25	0.9
Taman Penitipan Anak	22.68	0.7
Pos PAUD/PAUD Terintegrasi Posyandu	1.02	16.4

Sumber : Susenas 2017

Tabel 3.2 diatas memperlihatkan bahwa persentase tertinggi dari jenis pendidikan PAUD yang diikuti anak usia 0-6 adalah Taman Kanak-kanak yaitu

sebesar 64,05 persen pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 82,00 persen pada tahun 2017, kemudian diikuti Pos PAUD/PAUD Terintegrasi Posyandu sebesar 1,02 persen pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 16,4 persen pada tahun 2017. Dari Tabel 3.2 terlihat untuk jenis pendidikan Kelompok Bermain pada tahun 2017 apabila dibandingkan tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup besar dimana pada tahun 2016 sebesar 12,25 persen menjadi 0,9 persen pada tahun 2017, demikian juga untuk jenis pendidikan taman pendidikan anak dari sebesar 22,68 pada tahun 2016 menjadi 0,7 pada tahun 2017. Penurunan persentase anak umur 0-6 yang sekolah di taman penitipan anak dan kelompok bermain diimbangi dengan naiknya anak umur 0-6 tahun yang sekolah di pos PAUD/PAUD terintegrasi posyandu.

3.2 Anak dan Keluarga yang Tinggal Bersama

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Lingkungan keluarga merupakan salah satu lingkungan yang paling berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Pembelajaran awal bagi anak-anak dimulai dari lingkungan keluarganya masing-masing. Untuk itu, penting bagi setiap orang tua untuk dapat memberikan contoh-contoh positif agar anak dapat meniru kebiasaan baik tersebut, sehingga hal ini penting bagi anak dalam rangka pembentukan kepribadian yang baik ke depannya. Oleh karena itu, keberadaan kedua orang tua dalam hal ini bapak dan ibu kandung sangatlah penting.

Anak yang tinggal serumah dengan ibu kandung di sini mencakup anak yang tinggal serumah dengan ibu kandung saja, serta anak yang tinggal serumah dengan ibu kandung beserta bapak kandungnya pula. Secara naluri, seorang anak akan lebih dekat dengan ibu kandungnya, karena ibu mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk dekat dengan anak dibanding ayahnya. Beberapa kesempatan yang dimiliki ibu (tidak dimiliki ayah) adalah karena ibulah yang mengandung dan yang menyusui anak. Karena itu, peluang seorang anak untuk dapat tinggal serumah dengan ibu kandungnya menjadi lebih besar.

Berdasarkan hasil Susenas 2017 diperoleh data bahwa persentase anak yang tinggal serumah dengan ibu kandung mencapai sebesar 95,9 persen. Sementara sisanya sebesar 4,1 persen anak tinggal tidak bersama ibu kandungnya, dengan kemungkinan ibu kandung telah meninggal atau ibu kandung tinggal di rumah tangga yang berbeda.

Gambar 3.1 Persentase Anak yang Tinggal Serumah dengan Ibu Kandung , 2017



3.3 Perkawinan Usia Dini

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam undang-undang perkawinan tersebut, umur menjadi salah satu syarat dalam melaksanakan perkawinan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini telah melalui berbagai proses dan pertimbangan. Hal tersebut agar kedua pihak baik pria maupun wanita menjadi benar-benar siap baik secara fisik, mental, ataupun psikis. Tetapi, kenyataan yang terjadi sebenarnya masih ada perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai batas umur yang ditentukan baik pada pria maupun pada wanita, dan hal tersebut dikenal dengan istilah perkawinan usia dini.

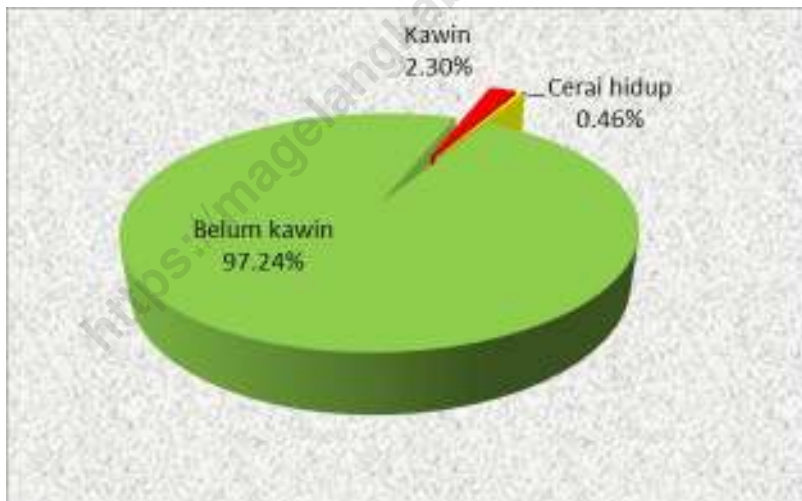
Perkawinan usia dini disebabkan oleh berbagai faktor. Ada faktor yang berasal dari dalam diri anak maupun dari luar diri anak. Faktor yang berasal dari dalam diri anak yaitu faktor pendidikan, faktor telah melakukan hubungan biologis, dan hamil sebelum menikah. Faktor yang berasal dari luar diri anak yaitu faktor pemahaman agama, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Perkawinan usia dini sangat memengaruhi fisik ataupun psikologis anak. Hal tersebut disebabkan karena kondisi organ reproduksi pada ibu yang menikah pada usia muda belum berfungsi secara optimal sehingga akan berpengaruh pada kondisi anak yang dilahirkan. Selain itu, ibu yang menikah pada usia muda pada umumnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti kemampuan mengasuh anak serta dalam pengendalian emosi dan tindakannya masih rendah. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak.

Perkawinan usia dini juga berdampak pada perkawinan itu sendiri di mana tingkat kemandirian dari pasangan tersebut masih rendah, masih rawan dan masih belum stabil sehingga dapat menyebabkan banyak terjadinya perceraian. Oleh karena itu, dari perkawinan usia dini tersebut akan sulit untuk memperoleh keturunan yang berkualitas. Selain itu jika dilihat dari segi kependudukan,

perkawinan usia dini mempunyai tingkat fertilitas yang tinggi sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kependudukan.

Pada publikasi ini, yang dimaksud dengan perkawinan usia dini adalah jika anak wanita berumur 10-18 tahun yang berstatus kawin dan pernah kawin dengan umur kawin pertamanya 15 tahun ke bawah. Dari gambar 3.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar anak perempuan berumur 10-18 tahun berstatus belum kawin yaitu sebesar 97,24 persen, sebesar 2,30 persen perempuan berumur 10-18 tahun berstatus kawin dan ada 0,46 persen yang berstatus cerai hidup.

Gambar 3.2 Persentase Anak Perempuan 10-18 Tahun Menurut Status Perkawinan, 2017



4. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Kesehatan merupakan salah satu investasi negara yang perlu diperhatikan, karena berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia yang menentukan nasib bangsa. Pentingnya pembangunan kesehatan ini telah menjadikannya sebagai salah satu tujuan Millennium Development Goals (MDGs). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya keras dalam meningkatkan pembangunan kesehatan dengan membuat kebijakan-kebijakan serta penyediaan fasilitas penunjang dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Pemantauan kondisi kesehatan masyarakat sangat diperlukan untuk melihat perkembangan pencapaian yang didapat serta dapat dijadikan sebagai landasan untuk membuat kebijakan-kebijakan baru guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Berikut akan disajikan gambaran kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Magelang. Namun, pada publikasi ini, untuk subbab tentang pelayanan antenatal dan kematian anak tidak dapat ditampilkan dikarenakan belum tersedianya data terbaru.

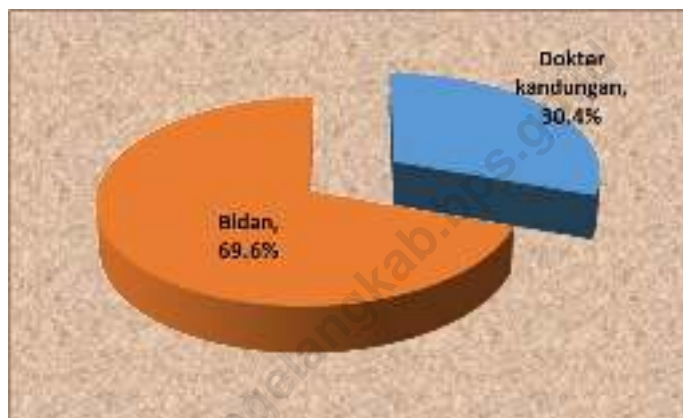
4.1 Penolong Kelahiran

Penolong kelahiran merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi dalam proses persalinan. Penolong kelahiran yang memiliki keterampilan dan kualitas yang baik, seperti dokter, bidan dan tenaga kesehatan lain yang sudah terlatih, akan cenderung membuat proses persalinan berjalan dengan lancar dan aman dibandingkan dengan penolong kelahiran yang bersifat tradisional seperti dukun. Namun, tidak sedikit proses persalinan di Kabupaten Magelang yang masih ditolong oleh dukun.

Berdasarkan data Susenas 2017 seperti yang disajikan pada gambar 4.1, dapat dilihat bahwa sebagian besar penolong kelahiran pertama di Kabupaten Magelang adalah bidan yaitu sebesar 69,6 persen sedangkan kelahiran yang ditolong oleh

dokter kandungan hanya sebanyak 30,4 persen. Ini membuktikan bahwa keberadaan Bidan di desa-desa yang dekat dengan masyarakat sangat membantu meningkatkan kesejahteraan warga sekitar yang membutuhkan, tidak hanya membantu dalam proses melahirkan tetapi Bidan juga sebagai tenaga kesehatan pertama di desa untuk menolong masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan.

Gambar 4.1. Persentase Penolong Pertama Proses Kelahiran, 2017



4.2 Air Susu Ibu (ASI)

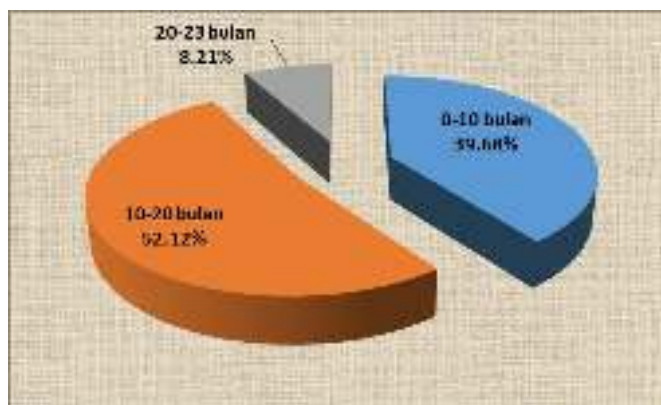
Balita merupakan calon penerus bangsa yang akan memengaruhi masa depan suatu negara. Bila balita sehat maka akan memiliki peluang yang besar untuk membangun negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kesehatan balita menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Salah satu faktor yang memengaruhi kesehatan balita adalah makanan yang dikonsumsi sejak lahir. Makanan yang terbaik untuk bayi adalah ASI. Salah satu kandungan ASI yang paling fenomenal adalah kolostrum yang mengandung zat kekebalan (immunoglobulin), protein dan vitamin A yang tinggi. ASI memberikan manfaat bagi bayi diantaranya bayi mendapat nutrisi dan enzim terbaik yang dibutuhkan, bayi mendapat zat-zat imun, serta perlindungan dan kehangatan melalui kontak dari kulit ke kulit dengan ibunya yang memberikan manfaat secara

psikologis. Susu formula tidak akan bisa menyamai ASI dalam hal kandungan maupun manfaat bagi bayi (Yuliarti: 2010). Oleh karena itu, pemberian ASI pada balita menjadi hal yang harus diperhatikan.

WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Para ahli menyatakan bahwa manfaat ASI akan meningkat jika bayi hanya diberi ASI saja selama 6 bulan pertama kehidupannya. Peningkatan itu sesuai dengan pemberian ASI eksklusif, serta lamanya pemberian ASI ditambah makanan padat setelah bayi berumur 6 bulan. Pedoman internasional yang menganjurkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan didasarkan pada bukti ilmiah tentang manfaat ASI bagi daya tahan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan bayi. Selain pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, standar pemberian makanan bagi balita yang lain adalah memberikan makanan pendamping ASI setelah 6 bulan dan ASI dilanjutkan hingga 2 tahun. Jika hal itu dilakukan maka anak tidak hanya sehat dan pandai, tetapi juga memiliki kemampuan spiritual (SQ) dan emosional (EQ) jauh lebih tinggi (Yuliarti: 2010).

Gambar 4.2. Persentase Balita (0-23 bulan) yang Diberi ASI Menurut Lama Pemberian ASI, 2017



Persentase balita yang mendapat ASI di Kabupaten Magelang sudah cukup tinggi. Ini terlihat oleh banyaknya persentase balita yang pernah diberi ASI yaitu

sebesar 98,01 persen dan 1,99 persen balita tidak diberi ASI. Dari persentase balita yang diberi ASI seperti pada gambar 4.2 diatas, balita kurang dari 10 bulan ada sebanyak 39,68 persen, balita 10-20 bulan ada sebanyak 52,12 persen dan balita lebih dari 20-23 bulan ada sebanyak 8,21 persen.

Rata-rata lama pemberian ASI eksklusif bagi balita di Kabupaten Magelang hanya mencapai 3,93 bulan, masih jauh di bawah batas yang dianjurkan WHO selama 6 bulan pertama. Demikian pula lama rata-rata pemberian ASI secara keseluruhan masih sekitar 10,93 bulan, masih jauh di bawah anjuran selama 2 tahun. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih bagi aparat pemerintah terkait agar lebih gencar memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya inisiasi penyusuan dini dan pemberian ASI eksklusif, karena lama pemberian ASI berpengaruh positif terhadap kondisi kesehatan dan proses tumbuh kembang anak balita.

4.3 Imunisasi

Pentingnya kesehatan balita dalam menentukan masa depan bangsa, maka pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesehatan balita di Kabupaten Magelang salah satunya dengan imunisasi. Program Pengembangan Imunisasi (PPI) menganjurkan agar semua anak mendapatkan imunisasi terhadap enam penyakit utama anak yang dapat dicegah dengan imunisasi yaitu tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus dan campak. Pemerintah melalui Program Pengembangan Imunisasi tersebut menetapkan Lima Imunisasi Dasar Lengkap yaitu BCG, DPT, Polio, Hepatitis B dan Campak. Untuk DPT, Polio dan Hepatitis B, Imunisasi bisa dikatakan lengkap jika sudah diberikan sebanyak 3 kali. Pemberian imunisasi pada balita seharusnya diberikan secara lengkap dan tepat waktu. Keseluruhan imunisasi sudah harus diberikan secara lengkap sebelum bayi berumur 1 tahun.

Tabel 4.1. Persentase Balita (0-59) Bulan Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi dan Jenis Kelamin, 2017

Jenis Kelamin	Jenis Imunisasi				
	BCG	DPT	Polio	Campak/ Morbili	Hepatitis B
1	2	3	4	5	6
Laki-Laki	94,41	88,41	90,96	76,58	92,02
Perempuan	98,57	95,33	97,57	89,91	96,35
Kab Magelang	96,45	91,79	94,19	83,10	94,14

Sumber: Susenas 2017

Berdasarkan jenis imunisasi yang diberikan, secara keseluruhan capaian imunisasi BCG, DPT, Polio, Hepatitis B dan Campak di Kabupaten Magelang telah melampaui 80 persen. Persentase balita yang pernah diberikan imunisasi BCG adalah sekitar 96,45 persen (laki-laki 94,41 persen dan perempuan 98,57 persen). Untuk pemberian imunisasi DPT sebanyak 3 kali, sebesar 91,79 persen balita pernah mendapat imunisasi tersebut (88,41 persen laki-laki dan perempuan 95,33 persen). Banyaknya balita yang pernah diberi imunisasi polio ada sekitar 94,19 persen (laki-laki 90,96 persen dan perempuan 97,57 persen). Untuk balita yang pernah mendapat imunisasi campak persentasenya sekitar 83,10 persen (laki-laki 76,58 persen dan perempuan 89,91 persen). Balita yang diimunisasi Hepatitis B yaitu sebesar 94,14 persen (laki-laki 92,02 persen dan perempuan 96,35 persen).

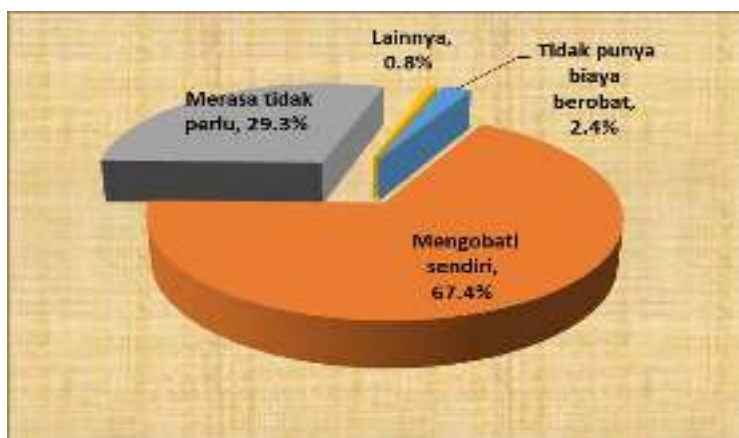
4.4 Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Seseorang yang memiliki keluhan kesehatan tentunya akan menghambat aktivitas sehari harinya. Dalam Susenas 2017, keluhan kesehatan

yang dicakup di antaranya panas, batuk, pilek, asma/napas sesak/cepat, diare/buang-buang air, sakit kepala berulang, sakit gigi dan lainnya. Pertanyaan mengenai keluhan kesehatan tersebut digunakan untuk menghitung angka kesakitan (morbiditas). Seseorang dikatakan sakit jika dia mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitas sehari-harinya. Jenis keluhan kesehatan yang akan dibahas dalam publikasi ini adalah keluhan yang biasa dialami anak-anak, yaitu panas, batuk, pilek, diare dan sakit kepala berulang. Dari jenis keluhan kesehatan tersebut, yang paling banyak dialami anak-anak (penduduk usia 0-18 tahun) di Kabupaten Magelang adalah pilek yaitu sebanyak 28,20 persen, dan sisanya sebesar 71,8 persen anak-anak tidak mengalami keluhan kesehatan.

Orang-orang yang mengalami keluhan kesehatan, tidak selamanya melakukan pengobatan ke fasilitas kesehatan, diantara mereka ada yang mengobati sendiri. Sebanyak 67,40 persen anak yang mempunyai keluhan kesehatan mengobati sendiri penyakitnya. Yang dimaksud dengan mengobati sendiri disini adalah termasuk anak-anak belum mampu mengurus diri sendiri dan dirawat/diobati oleh orang tua, keluarga atau orang dewasa lainnya. Selain itu ada yang mempunyai alasan merasa tidak perlu berobat, tidak punya biaya berobat, dan lainnya. Seperti terlihat pada gambar 4.3 dibawah ini.

Gambar 4.3. Persentase Alasan Anak 0-18 Tahun Tidak Berobat Jalan, 2017



4.5 Kebiasaan Merokok Pada Anak

Tidak bisa dipungkiri kalau anak-anak akan cenderung meniru apa yang biasa dilakukan oleh orang tuanya. Seperti kebiasaan merokok yang biasa dilakukan orang dewasa. Merokok disini bisa merokok menggunakan rokok elektrik dan merokok tembakau. Dari hasil Susenas 2017 untuk anak 5 -18 tahun, diperoleh data bahwa ada sebanyak 99,29 persen anak-anak tidak merokok menggunakan rokok elektrik dan sisanya menyatakan tidak tahu. Sedangkan untuk merokok tembakau seperti terlihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 4.4. Persentase Anak 5 - 18 Tahun Yang Merokok Tembakau, 2017



Dari Gambar 4.4 diatas tentang persentase anak usia 5 – 18 tahun yang merokok tembakau. Bersyukur ada sebanyak 94,57 persen yang tidak merokok tembakau dan ternyata ada sekitar 6 persen anak yang merokok tembakau dimana 4,52 persen merokok tembakau setiap hari dan ada 0,90 persen merokok tembakau walaupun tidak setiap hari. Perlu bimbingan dari orang tua dan pihak terkait untuk sosialisasi terhadap masyarakat terutama anak-anak tentang manfaat dan bahaya dari merokok ini untuk mereka. Memang sebaiknya usia anak-anak bukan usia yang diperbolehkan untuk merokok.

4.6 Akses ke Pelayanan Kesehatan

Akses ke pelayanan kesehatan merupakan salah satu permasalahan yang ada di Kabupaten Magelang. Adanya ketidakmerataan pelayanan kesehatan dan akses yang sulit ke pelayanan kesehatan di wilayah tertentu masih menjadi masalah yang sering terjadi. Sulitnya akses ke pelayanan kesehatan dapat menjadi salah satu penyebab masih adanya masyarakat yang berobat ke bukan tenaga kesehatan.

Tabel 4.2 Persentase Anak yang Berobat Jalan
Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Fasilitas Kesehatan, 2017

Fasilitas Kesehatan	Laki-laki	Perempuan
1	2	3
Rumah Sakit Pemerintah	8,33	3,57
Rumah Sakit Swasta	4,17	0,00
Praktek Dokter/Bidan	48,63	45,98
Klinik/Praktek Dokter	5,45	15,48
Puskesmas/Pustu	23,84	35,31
UKBM	6,40	4,81
Praktek Pengobatan Tradisional	3,95	0,00
Lainnya	1,20	0,00

Sumber : Susenas 2017

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa fasilitas kesehatan yang merupakan pilihan utama masyarakat di antaranya praktek dokter/bidan dan puskesmas/pustu. Meskipun demikian, masih ada anak yang berobat ke bukan tenaga kesehatan seperti ke praktek pengobatan tradisional dan lainnya. Masih adanya anak yang berobat ke bukan tenaga kesehatan sudah seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan serta mempermudah akses ke pelayanan kesehatan demi mewujudkan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

4.7 Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan merupakan fasilitas kesehatan yang dimiliki masyarakat yang digunakan untuk berobat ke salah satu fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Jenis jaminan kesehatan biasanya ditunjukkan dengan kepemilikan kartu jaminan kesehatan. Tabel berikut menunjukkan banyaknya jaminan kesehatan yang digunakan anak untuk berobat jalan.

Tabel 4.3 Persentase Anak Yang Berobat Jalan
Menurut Jenis Jaminan Kesehatan dan Jenis Kelamin, 2017

Jaminan Kesehatan	Laki-laki	Perempuan
1	2	3
Penerima Bantuan Iuran	16,75	18,81
Non Penerima Bantuan Iuran	5,33	9,42
Jamkesda	2,95	1,70
Asuransi Swasta	0	0
Perusahaan/Kantor	0	1,50
Tidak Menggunakan	75,00	68,60

Sumber: Susenas 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa jenis jaminan kesehatan yang digunakan yang terbanyak adalah mereka memilih untuk tidak menggunakan jaminan kesehatan (laki-laki 75 persen dan perempuan 68,60 persen). Ada banyak alasan kenapa masyarakat lebih banyak memilih tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka, seperti alasan waktu dan juga karena alasan prosedur dan banyak alasan yang lain. Jaminan kesehatan PBI seperti jamkesmas, jaminan kesehatan non PBI seperti Askes dan jamkesda serta jaminan kesehatan dari perusahaan/kantor dimana orang tua mereka bekerja, hanya sekitar tiga puluh persen saja.

5. PENDIDIKAN

5.1 Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak anak umur 5-18 tahun yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah. Seseorang dengan status masih sekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA dan pendidikan tinggi yaitu PT) maupun pendidikan non formal (Paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.

Tabel 5.1 menyajikan persentase anak umur 5-18 tahun menurut jenis kelamin serta partisipasi sekolah untuk pendidikan formal dan non formal. Pada tahun 2017, terdapat 81,39 persen anak berumur 5-18 yang masih bersekolah, 11,28 persen belum/tidak pernah bersekolah dan 7,33 persen sudah tidak bersekolah lagi. Dari persentase anak yang masih bersekolah, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persentase anak laki-laki dan anak perempuan berumur 5-18 tahun, di mana masing-masing sebesar 42,18 persen dan 39,20 persen.

Tabel 5.1 Persentase Anak 5-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2017

Partisipasi Sekolah	Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	5,99	5,29	11,28
Masih Bersekolah	42,18	39,20	81,39
Tidak Bersekolah lagi	3,54	3,79	7,33

Sumber: Susenas 2017

Tabel 5.2 Persentase Anak 5-18 Tahun Menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2017

Kelompok Umur	Partisipasi Sekolah			Total
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah	
1	2	3	4	5
5-6	77,53	22,47	0	100,00
7-12	1,06	98,94	0	100,00
13-15	0	96,45	3,55	100,00
16-18	0	70,36	29,64	100,00
5-17	12,16	84,07	3,77	100,00
7-17	0,54	95,02	4,44	100,00

Sumber : Susenas 2017

Faktor demografis lain yang memengaruhi akses penduduk pada pendidikan antara lain adalah umur. Semakin tinggi kelompok usia sekolah semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya. Persentase penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun (kelompok usia SD/MI) tercatat sebesar 98,94 persen, kelompok umur 13–15 tahun (kelompok usia SMP/MTs) sebesar 96,45 persen dan kelompok umur 16-18 tahun (kelompok usia SM/MA) sebesar 70,36 persen. Penurunan ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti akses dan ketersediaan fasilitas sekolah pada jenjang yang lebih tinggi.

Perkembangan dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan orangtua menyekolahkan anaknya untuk pertama kali pada usia yang masih muda atau sebelum umur yang direkomendasikan. Hasil Susenas tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat anak berumur 5-6 tahun yang saat ini bersekolah (22,47 persen), meskipun pada kelompok umur ini bukan merupakan usia wajib sekolah. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur pendidikan yang direkomendasikan yaitu 7-17 tahun, terlihat bahwa anak pada kelompok umur 7-17 yang bersekolah sebesar 95,02 persen, anak yang tidak/belum sekolah sebesar 0,54 persen dan anak yang tidak sekolah lagi sebesar 4,44 persen.

5.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh semua warga negara Indonesia, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab terhadap program tersebut. Pencanangan program wajib belajar dimulai pada tahun 1984 yaitu gerakan wajib belajar 6 tahun dan ditingkatkan menjadi wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994. Program wajib belajar merupakan bagian dari kerangka aksi dasar pendidikan untuk semua (PUS) atau Education for All (EFA) yang telah disepakati secara global. Untuk mengukur partisipasi penduduk usia sekolah dalam mengikuti pendidikan berdasarkan jenjang dan umur dapat diketahui melalui indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

APS digunakan untuk melihat partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok usia sekolah tertentu. APS dibedakan menjadi APS 7-12 tahun, APS 13-15 tahun, APS 16-18 tahun dan APS 19-24 tahun. APS 7-12 tahun berarti angka partisipasi penduduk berumur 7-12 yang saat ini masih bersekolah di jenjang manapun. Sementara itu APM digunakan untuk melihat partisipasi sekolah

menurut kelompok usia tertentu dan jenjang pendidikan. APM dibedakan menjadi APM SD, APM SMP, APM SM dan APM PT. APM SD berarti angka partisipasi penduduk berumur 7-12 tahun yang masih bersekolah di SD/Paket A. Sedangkan APK digunakan untuk melihat partisipasi sekolah penduduk menurut jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat umur. Seperti APM, APK dibedakan menjadi APK SD, APK SMP, APK SM dan APK PT. Interpretasi APK SD yaitu angka partisipasi penduduk yang masih bersekolah di jenjang SD/MI pada usia apapun.

5.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS adalah gambaran penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur. Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal seperti paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/MA.

Gambar 5.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 APS 7-12 tahun sebesar 98,94 persen. Hal ini berarti dari 100 anak usia 7-12 tahun, sebanyak 98 anak bersekolah dan ada 2 anak tidak sekolah (tidak pernah sekolah dan tidak sekolah lagi), APS 13-15 tahun sebesar 96,45 persen dan APS 16-18 tahun sebesar 70,36 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 kondisi ini lebih tinggi untuk pada setiap kelompok umur. Gambar 5.1 juga memperlihatkan bahwa semakin tinggi kelompok usia sekolah semakin rendah persentase anak yang bersekolah.

Jika dicermati, semakin tinggi kelompok umur, maka APS akan semakin mengecil. Melalui fenomena ini juga terlihat bagaimana umur sebagai salah satu karakteristik demografis ternyata dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap partisipasi penduduk dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan. Hal ini terjadi lebih karena semakin meningkatnya umur penduduk,

maka kesempatan untuk mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi semakin terbatas, baik dalam hal biaya, akses, maupun kemampuan akademis.

Tabel 5.3 APS Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2017

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
1	2	3	4
Umur 7-12	98,97	98,90	98,94
Umur 13-15	96,61	96,26	96,45
Umur 16-18	72,39	68,21	70,36

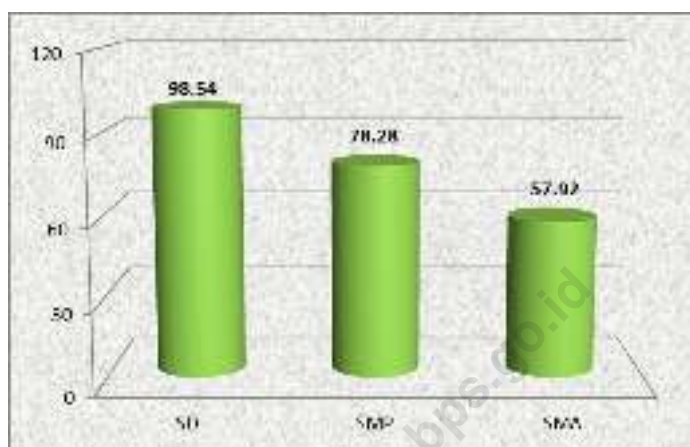
Sumber : Susenas 2017

5.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Selain APS, indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. APM merupakan proporsi jumlah anak kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran misalnya APM SD adalah proporsi jumlah murid SD/Sederajat yang berusia 7–12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7–12 tahun. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2017, pencapaian APM SD sebesar 98,54 persen, APM SMP sebesar 78,28 persen dan APM SM sebesar 57,92 persen. Berdasarkan jenjang pendidikan, terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah besaran APM atau dengan kata lain berbanding terbalik antara APM dan jenjang pendidikan.

Gambar 5.1 Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Menurut Jenjang Pendidikan, 2017



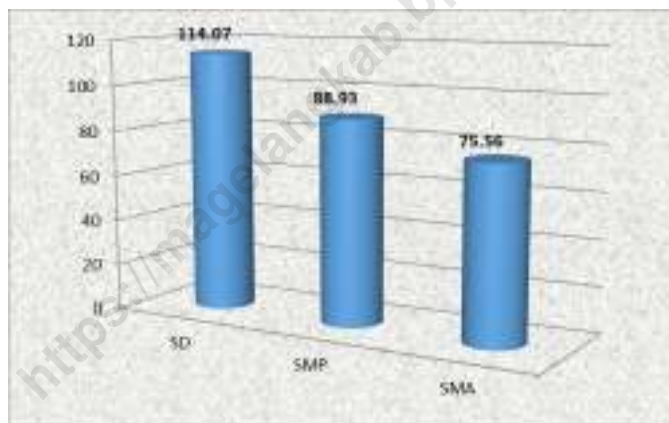
5.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan menurut jenjang pendidikan tanpa melihat umur. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7–12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen apabila jumlah murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD/ sederajat berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun).

Berdasarkan gambar 5.2 diketahui bahwa APK SD sebesar 114,07 persen, APK SMP sebesar 88,93 persen dan APK SM sebesar 75,56 persen. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah APK. Penurunan APK pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi sejalan dengan kecenderungan penurunan APS dan APM pada usia atau jenjang yang semakin tinggi.

APK SD sebesar 114,07 persen (lebih dari 100 persen) menunjukkan bahwa ada sekitar 14,07 persen anak yang bersekolah di SD/ sederajat berusia kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun. Dengan kata lain angka tersebut menunjukkan bahwa murid SD/ sederajat selain mencakup anak yang berusia 7–12 tahun, juga mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa terdapat anak yang terlambat masuk sekolah pada jenjang SD/ sederajat atau sebaliknya terdapat anak yang terlalu dini untuk bersekolah SD/ sederajat.

Gambar 5.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Menurut Jenjang Pendidikan, 2017



5.3 Alasan Tidak Sekolah

Kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan belum dapat dinikmati oleh seluruh anak di Kabupaten Magelang sehingga masih terdapat anak-anak yang tidak/belum pernah sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa alasan yang melatar belakangi antara lain karena tidak ada biaya, bekerja, menikah, mengurus rumah tangga, merasa pendidikan cukup, cacat, dan lain-lain. Alasan karena tidak ada biaya dan bekerja umumnya berkaitan erat dengan faktor ekonomi (kemiskinan atau kemampuan ekonomi orang tua). Sementara untuk

alasan lainnya karena, menikah/mengurus rumah tangga, dll umumnya berkaitan dengan faktor sosial budaya seperti tidak naik kelas, motivasi anak rendah, kurangnya perhatian orang tua memotivasi anak, atau adanya anggapan bahwa perempuan sebaiknya tidak bersekolah terlalu tinggi.

Tabel 5.4 Persentase Anak 7-18 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi Menurut Jenis Kelamin, 2017

Alasan Tidak/Belum Pernah Bersekolah atau Tidak Bersekolah Lagi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	5
Tidak ada biaya	16,98	14,39	31,37
Bekerja/mencari nafkah	15,72	14,08	29,79
Menikah	0	5,09	5,09
Mengurus rumah tangga	0	6,94	6,94
Merasa pendidikan cukup	4,93	1,93	6,86
Cacat	0	1,41	1,41
Lainnya	10,78	7,76	18,54
Jumlah	48,41	51,59	100,00

Sumber : Susenas 2017

Seperti tersaji dalam tabel 5.4, mayoritas anak 7-18 tahun tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi adalah dengan alasan tidak ada biaya yaitu sebesar 31,37 persen. Faktor ekonomi juga menyebabkan seorang anak harus bekerja/mencari nafkah sehingga mendorong mereka untuk tidak sekolah. Ada sebesar 29,79 persen anak yang tidak sekolah dengan alasan bekerja/mencari nafkah. Selain itu terdapat anak yang tidak bersekolah karena alasan menikah (5,09 persen), mengurus rumah tangga (6,94 persen), merasa pendidikan cukup (6,86 persen), cacat (1,41 persen), dan sisanya adalah alasan lainnya (18,54 persen).

Peraturan Pemerintah RI No.47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Bab VI Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar

tanpa memungut biaya. Untuk menunjang program wajib belajar tersebut, pemerintah telah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pada dasarnya bertujuan untuk meringankan beban semua siswa dan membebaskan siswa miskin dari kewajiban membayar uang sekolah. Namun demikian bahwa persentase anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah dengan alasan tidak ada biaya masih cukup besar. Perlu ditinjau kembali program sekolah gratis untuk tingkat pendidikan dasar yang didengungkan Pemerintah, untuk kedepan dapat berhasil dan dinikmati oleh masyarakat luas.

<https://magelangkab.bps.go.id>

6. PERLINDUNGAN KHUSUS

6.1. Perkembangan Perlindungan Anak

Kemajuan yang dialami bangsa Indonesia tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi masyarakat, akan tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satu yang terkena dampak negatif dari kemajuan tersebut adalah anak-anak. Berbagai permasalahan sosial anak semakin hari semakin kompleks. Hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan terhadap permasalahan-permasalahan sosial anak masih memerlukan perhatian secara komprehensif dari seluruh elemen masyarakat. Perlu kesadaran bahwa penanganan permasalahan sosial anak yang dilakukan masyarakat masih terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peranan pemerintah masih sangat besar untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana Harian LSM 'Sahabat Perempuan', Putri Andhani Prabasasi pada **SIAGAINDONESIA.COM, Jumat 26 Oktober 2018** menjelaskan, jumlah kasus yang didampingi LSM 'Sahabat Perempuan' ada 54 kasus yang terdiri dari 38 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 14 Kekerasan Seksual Anak (KSA), dan 2 Kekerasan Dalam Pacaran (KDP).

Dari 14 kasus kekerasan seksual anak ada sebanyak 10 kasus yang diselesaikan dengan litigasi/pidana menggunakan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam tahun 2017 sudah ada 3 kasus kekerasan seksual anak yang diselesaikan dan diputus pengadilan dengan putusan hukuman antara 5 sampai 7 tahun penjara. Empat kasus lainnya diselesaikan secara non litigasi, mengingat korban dan pelaku masih berusia di bawah 12 tahun. Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka diselesaikan melalui proses penyelesaian pidana di luar pengadilan melalui diversi. Hal ini

bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari dari perampasan kemerdekaan serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dan maraknya kasus kekerasan dan pelecehan anak yang belakangan ini merebak memperlihatkan terutama ketidakhadiran keluarga, masyarakat dan negara dalam melindungi anak dari ancaman kekerasan. Itulah beberapa fakta yang perlu mendapat perhatian serius untuk diupayakan langkah-langkah perlindungan terhadap anak khususnya di Kabupaten Magelang.

6.2 Anak 10-18 Tahun yang Bekerja

6.2.1 Umur Anak yang Bekerja

Sub bab ini membahas anak 10-18 tahun yang bekerja. Anak dianggap bekerja jika mereka bekerja minimal satu jam secara berturut-turut dalam periode seminggu yang lalu dan pekerjaan itu dilakukan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan dalam bentuk uang maupun barang. Keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan merupakan salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan.

Gambar 6.1 Persentase Anak Menurut Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin, 2017



Hasil Susenas 2017 menunjukkan sekitar 11 ribu anak 10-18 tahun di Kabupaten Magelang masuk dalam kelompok pekerja. Jumlah ini mencapai sekitar 5,89 persen dari total penduduk usia 10-18 tahun. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase pekerja anak berjenis kelamin laki-laki, lebih besar dibandingkan dengan pekerja anak yang berjenis kelamin perempuan. Persentase pekerja anak laki-laki adalah 3,44 persen, sedangkan persentase pekerja anak perempuan adalah 2,45 persen. Walaupun persentase anak yang bekerja ini tidak cukup banyak, namun hendaknya menjadi pemikiran bersama bahwa sebenarnya tugas anak saat ini bukan untuk bekerja. Gambar 6.1 juga menjelaskan bahwa persentase anak yang bersekolah selama seminggu yang lalu cukup besar yakni sebesar 88,67 persen dengan rincian anak laki-laki 46,26 persen dan anak perempuan 42,41 persen.

6.2.2 Anak 10-18 Tahun yang Bekerja Menurut Pendidikan

Dari tabel 6.1 dibawah, tercatat bahwa besarnya pekerja anak 10-18 tahun didominasi oleh anak dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMP sebesar 43,37 persen dengan proporsi laki-laki (32,21 persen) lebih tinggi dibanding perempuan (11,16 persen). Untuk pekerja anak dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SM hanya sebesar 6,11 persen dengan proporsi laki-laki (2,60 persen) dan perempuan (3,52 persen), ini membuktikan bahwa masih ada harapan ataupun kemauan bagi anak-anak setelah lulus SM untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi.

Namun bila dilihat pekerja anak dengan pendidikan tertinggi SD (28,17 persen) dengan proporsi laki-laki (16,81 persen) dan perempuan (11,36 persen) dan bahkan ada yang tidak punya ijazah SD pun cukup banyak yakni sekitar 22,35 persen yang persentase lebih tinggi pada anak perempuan (14,17 persen) dan laki-laki (7,65). Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian lebih untuk meminimalkan jumlah pekerja anak karena saat ini hak mereka adalah belajar, belum cukup usia untuk bekerja.

Tabel 6.1 Persentase Anak 10-18 Tahun Yang Bekerja Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi yang pernah/sedang Diduduki dan Jenis Kelamin, 2017

Jenis Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	5
Tidak punya ijazah SD	7,65	14,17	22,35
SD/Sederajat	16,81	11,36	28,17
SMP/Sederajat	32,21	11,16	43,37
SM/Sederajat	2,60	3,52	6,11
Jumlah	59,26	40,74	100,00

Sumber : Susenas 2017

6.2.3 Anak 10-18 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Seperti halnya tenaga kerja pada umumnya, pekerja anak juga bekerja pada lapangan pekerjaan yang digeluti oleh orang dewasa. Struktur lapangan pekerjaan penduduk usia 10-18 tahun berdasarkan Susenas 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. 2 Persentase Anak 10-18 Tahun Yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2017

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	5
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	27,67	15,03	42,71
Pertambangan, Penggalian	6,31	0	6,31
Industri Pengolahan	11,71	3,52	15,22
Konstruksi	7,56	0	7,56
Perdagangan, reparasi	6,02	22,18	28,20
Jumlah	59,27	40,73	100,00

Sumber : Susenas 2017

Tabel 6.2 menunjukkan bahwa pekerja anak berusia 10-18 tahun hampir 50 persen anak-anak bekerja di sektor pertanian. Secara umum, terdapat 5 lapangan

usaha utama yang menampung pekerja anak, yaitu 42,71 persen di sektor Pertanian; 28,20 persen di sektor perdagangan; 15,22 persen di sektor industri pengolahan; sektor konstruksi 7,56 persen dan 6,31 persen pada sektor pertambangan. Jika dilihat dari komposisinya, di semua lapangan pekerjaan utama, pekerja anak laki-laki lebih tinggi dibanding pekerja anak perempuan hanya di sektor perdagangan pekerja anak perempuan lebih tinggi dibanding pekerja anak laki-laki.

6.2.4 Anak 10-18 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Menurut status pekerjaan utama, persentase pekerja anak, besarnya hampir merata di semua status pekerjaan utama. Namun sebagian besar (39,10 persen) bekerja dengan status sebagai pekerja keluarga/pekerja tak dibayar. Sementara anak yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 26,87 persen. Sisanya adalah anak yang bekerja sebagai pekerja bebas dan berusaha sendiri, masing-masing sebesar 20,85 persen dan 13,18 persen. Dan berdasarkan jenis kelamin, secara total pekerja anak laki-laki (59,57 persen) cenderung lebih besar dibanding pekerja anak perempuan (40,73 persen). Kondisi ini terjadi hampir pada semua status pekerjaan utama, kecuali pada status pekerjaan utama sebagai buruh/karyawan/pegawai, persentase pekerja anak perempuan (15,65 persen) lebih tinggi dibanding pekerja anak laki-laki (11,22 persen). Kondisi ini cukup memprihatinkan karena masih banyaknya anak-anak yang harus bekerja sebagai buruh/karyawan maupun pekerja bebas. Melihat kondisi fisik mereka yang cenderung masih rentang harus melakukan pekerjaan berat.

Tabel 6. 3 Persentase Anak 10-18 Tahun Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2017

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	5
Berusaha sendiri	7,07	6,01	13,18
Buruh/karyawan/pegawai	11,22	15,65	26,87
Pekerja bebas	16,59	4,25	20,85
Pekerja keluarga/tidak dibayar	24,28	14,81	39,10
Jumlah	59,27	40,73	100,00

Sumber : Susenas 2017

6.2.5 Anak 10-18 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Pekerjaan Utama

Dari tabel 6.4 terlihat bahwa sekitar 35,07 persen pekerja anak bekerja di sektor pertanian dan 4,04 persen di sektor perdagangan sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar. Terdapat sekitar 12,13 persen pekerja anak yang bekerja di sektor perdagangan, sektor pertambangan 6,31 persen, sektor industri 8,42 persen berstatus sebagai buruh/karyawan/ pegawai. Sementara anak yang bekerja di sektor pertanian 4,25 persen, sektor industri pengolahan 6,80 persen, sektor konstruksi 7,56 persen dan sektor perdagangan 2,24 persen dengan status pekerjaan sebagai pekerja bebas. Selanjutnya pekerja anak berstatus berusaha sendiri ada sebanyak 3,39 persen di sektor pertanian dan 9,79 persen di sektor perdagangan. Untuk lebih detail bisa dilihat pada tabel 6.4 berikut.

Tabel 6.4 Persentase Anak 10-18 Tahun Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2017

Lapangan Pekerjaan Utama	Status Pekerjaan Utama				Total
	Berusaha sendiri	Buruh / karyawan / pegawai	Pekerja bebas	Pekerja keluarga / tidak dibayar	
1	2	3	4	5	6
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3,39	0	4,25	35,07	42,71
Pertambangan, Penggalan	0	6,31	0	0	6,31
Industri Pengolahan	0	8,42	6,80	0	15,22
Konstruksi	0	0	7,56	0	7,56
Perdagangan, reparasi	9,79	12,13	2,24	4,04	28,20
Jumlah	13,18	26,87	20,85	39,10	100,00

Sumber : Susenas 2017

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno-Hatta No. 4 Kota Magelang 56511,

Telp. (62-293) 788143, Faks (62-293) 788143,

E-Mail : bps3308@bps.go.id Homepage: <http://magelangkab.bps.go.id>

ISBN 978-602-51242-0-6



9 786025 324208